

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2011, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung.
- Ahmad Rifai, 2011, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arief Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari, 2005, *Aspek-Aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta.
- Bambang Waluyo, 2011, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta.
- Eva Achjani Zulfa, 2010, *Gugurnya Hak Menuntut: Dasar Penghapus, Peringatan, dan Pemberat Pidana*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- , 2011, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Lubuk Agung, Bandung.
- Farhana, 2010, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Henny Nuraeny, 2011, *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- J.E. Sahetapy, 1987, *Victimologi: Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Lexy J. Moleong, 2018, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Lilik Mulyadi, 2004, *Hukum Acara Pidana: Suatu Tinjauan Khusus terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2007, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Peradilan*, Mandar Maju, Bandung.

- , 2007, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Teknik Penyusunan, dan Permasalahannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Loebby Loqman, 2002, *Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Hukum Acara Pidana (HAP)*, Datacom, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2012, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marlina dan Azmiati Zuliah, 2015, *Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Refika Aditama, Bandung.
- Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, 2014, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, Sage Publications, California.
- Maya Indah, 2014, *Perlindungan Korban: Suatu Perspektif Viktimologi dan Kriminologi*, Edisi Kedua, Kencana, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Rena Yulia, 2010, *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Romli Atmasasmita, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Mandar Maju, Bandung.
- , 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana, Jakarta.
- Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- , 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Sinlaeloe, P. S., 2021, *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Perspektif Hukum dan HAM*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Siswanto Sunarso, 2012, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Soenarto Soerodibroto, 2003, *KUHP dan KUHAP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.

Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2014, *Kriminologi*, Cetakan ke-14, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung.

Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Internet

"Mengkaji Kembali Posisi Korban Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana", 2016, ResearchGate, <https://www.researchgate.net/publication/323852097>, diakses tanggal 16 Mei 2026 pukul 02.42 WIB.

"Perbedaan Das Sollen dan Das Sein", Hukumonline, <https://www.hukumonline.com>, diakses tanggal 16 Mei 2026 pukul 02.27 WIB.

"7 Inisiatif Pemenuhan Hak Korban dan Pihak Ketiga dalam Pembaharuan KUHAP", Hukumonline, <https://www.hukumonline.com/berita/a/7-inisiatif-pemenuhan-hak-korban-dan-pihak-ketiga-dalam-pembaharuan-kuhap-lt63a451a6a0330/>, diakses tanggal 16 Mei 2026 pukul 02.48 WIB.

"Wajib Dibaca: 6 Tips Dasar Penelitian Hukum", Hukumonline, <https://www.hukumonline.com/berita/a/wajib-dibaca-6-tips-dasar-penelitian-hukum-lt57398fe1dc462/>, diakses 8 Agustus 2025 pukul 01.02 WIB.

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2016, "HAM Adalah Hak Dasar Manusia yang Harus Dilindungi Negara dan Pemerintah", <https://www.kemhan.go.id/2016/05/18/ham-adalah-hak-dasar-manusia-yang-harus-dilindungi-negara-dan-p.html>, diakses tanggal 15 Mei 2026 pukul 10.34 WIB.

Komisi Yudisial Republik Indonesia, "Memotret Pertimbangan Putusan Hakim dari Berbagai Perspektif", <https://komisiyudisial.go.id>, diakses tanggal 17 Mei 2026.

Hukumonline, 2026, "Pakar Sebut KUHAP Baru Sudah Adopsi Hak Korban, Implementasinya Jadi Tantangan," diakses 27 April 2026, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pakar-sebut-kuhap-baru-sudah-adopsi-hak-korban--implementasinya-jadi-tantangan-lt6998035a7bf67/>.

C. Jurnal/Artikel Ilmiah/Karya Ilmiah

Dahlia Sasmita, 2024, "Pemenuhan Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe.

Damayanti, I. dan Paramudhita, R.R., 2024, "Peran Restitusi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang", *UNES Law Review*, Vol. 6 No. 3.

Efendik Kurniawan dan M. Sholehuddin, 2019, "Tipologi Korban Tindak Pidana KDRT dan Perdagangan Orang dalam Perspektif Viktimologi", *Indonesian Comparative Law Review*, Vol. 1, No. 2, tersedia di <https://scholarhub.ui.ac.id/iclr/vol1/iss2/5>.

Fabhian Akbar Dewa Parawansa, 2023, "Pelaksanaan Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Bekasi", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.

Henny Nuraeny, 2013, "Kebijakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking in Persons) dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional", *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 28 No. 1. <https://doi.org/10.25072/jwh.v28i1.186>

Indah Damayanti dan Radea Respati Paramudhita, 2024, "Peran Restitusi Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang", *UNES Law Review*, Vol. 6 No. 3, hlm. 8585-8591.

Komariah Emong Sapardjaja dan Mieke Yustia Ayu Ratna Sari, 2021, "Pengaturan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Keadilan Restoratif", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 28 No. 1.

Manurung, Rauf Sharim, Zulfan, dan Muhammad Nasir. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Nomor: 1897/Pid.Sus/2022/PN.

Mdn)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 7, no. 2 (2024). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v7i2.16562>.

Mudzakkir, 2008, "Kedudukan Korban Tindak Pidana dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Hukum*, Vol. 15 No. 1.

Perlindungan Hukum Anak Korban Tindak Pidana Eksploitasi Seksual dalam Perspektif Kepastian Hukum, 2024, *Jurnal Referendum*, APPIHI, hlm. 5.

Putri, A., et al., 2025, "Analisis Hukum terhadap Implementasi Perlindungan Korban TPPO di Kamboja", *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, 2(2).

Rauf Sharim Manurung, 2024, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Manusia (Studi Putusan Nomor 1897/Pid.Sus/2022/PN.Mdn)", Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe.

Siswanto, H., et al., 2024, "Humanistic Approach in Protecting Victims of Human Trafficking Crimes", *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, 8(13).

Wahyu Wiriadinata, 2014, "Korban Kejahatan dan Kesejahteraan", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 44 No. 1. <https://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/47>.

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4720).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 jo. Peraturan pemerintah Nomor 35/2020 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.

Protokol PBB tentang Pencegahan, Penindakan, dan Penghukuman Perdagangan Orang, Khususnya Perempuan dan Anak-Anak (Protokol Palermo) Tahun 2000.

E. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 176/Pid.Sus/2017/PN Amb, tanggal 1 November 2017 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Putusan Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 56/PID.SUS/2017/PT AMB, tanggal 30 Januari 2018.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1584 K/Pid.Sus/2021 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, tanggal 5 Agustus 2021.